

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak perubahan dinamis yang dirasakan oleh makhluk hidup. Saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat yang menandakan dunia telah memasuki era *society* 5.0 sebagai lanjutan dari era *society* 4.0 yang ditandai dengan munculnya kecerdasan buatan seperti *Internet of Things* dan *big data*. Kemajuan teknologi ini memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan pada kehidupan sehari-hari.

Di era 5.0, kecepatan perkembangan teknologi telah menghasilkan banyak inovasi dari para profesional yang ingin meningkatkan kehidupan masyarakat. Industri keuangan adalah salah satu aspek kehidupan manusia dan teknologi telah meresap kedalamnya. *Financial Technology*, sering dikenal sebagai *FinTech* atau teknologi keuangan dalam bahasa Indonesia, adalah kemajuan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan prosedur keuangan. Penerapan teknologi sistem keuangan dengan keluaran barang, jasa, teknologi, atau inovasi yang berefek pada stabilitas moneter, sistem keuangan seimbang, serta efektivitas sistem pembayaran, dikenal sebagai *Financial Technology* menurut Bank Indonesia.

Sedangkan kriteria dari *financial technology* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 3 Ayat 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yaitu bersifat inovatif dan memberikan dampak pada produk dan layanan. *Financial technology* yang bersifat inovatif diimplementasikan dengan kemunculan uang elektronik. Uang Elektronik digunakan untuk melakukan pembayaran nontunai. Konsumen dapat membeli kartu elektronik dan mengisi saldo dengan melakukan *top-up* saldo kemudian dapat digunakan (Dwi Aksami & Jember, 2019). Uang elektronik dapat dipakai untuk membayar tarif jalan tol, parkir, tiket transportasi umum, hingga berbelanja di supermarket. Namun, dalam penggunaannya, uang elektronik tidak dianggap dapat menggantikan sepenuhnya uang tunai.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 3 Ayat

2, Uang Elektronik dapat dibedakan berdasarkan:

a. Media penyimpan Nilai Uang Elektronik:

1. *Server based*, dimana media penyimpan yang dimaksud adalah *server*.
2. *Chip based*, dimana media penyimpan yang dimaksud adalah *chip*.

b. Pencatatan data identitas pengguna:

1. *Unregistered*

Didalamnya terdapat *chip* dengan nominal uang maksimal Rp1.000.000. Dikatakan sebagai jenis uang elektronik *unregistered* karena memungkinkan pemegang kartu dapat menggunakannya.

2. *Registered*

Berbasis *server* dengan nominal uang maksimal Rp5.000.000. Dikatakan sebagai jenis uang elektronik *registered* karena identitas pengguna akan disimpan oleh penerbit saat menerbitkan kartu tersebut. Dalam penggunaannya pun membutuhkan PIN kode untuk melakukan transaksi.

Adapun contoh uang elektronik yang beredar di Indonesia digambarkan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1. 1 Jenis Uang Elektronik yang Beredar di Indonesia

Uang Elektronik Berbasis Chip (<i>Chip-Based</i>)	Flazz (BCA)
	e-Money (Mandiri)
	Tap Cash (BNI)
	Brizzi (BRI)
	Mega Cash (Bank Mega)
	JakCard (Bank DKI)
Uang Elektronik Berbasis Server (<i>Server-Based</i>)	Gopay
	OVO Cash
	T-Cash Telkomsel
	LinkAja
	Dana

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, bidang keuangan telah dimasuki oleh kemajuan teknologi didalamnya yang semakin berkembang dengan pesat hingga memberikan inovasi serta terobosan terbaru yang dapat berguna untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Anagnostopoulos dalam (Marhadi et al., 2024) mengatakan bahwa *Fintech* merupakan salah satu inovasi teknologi dalam bidang finansial yang memiliki dampak perubahan yang besar bagi kehidupan sosial. *FinTech* yang berkembang memberikan dampak besar bagi pihak-pihak yang mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi (Akhsan & Deliyana Firmialy, 2024). Kemudahan *FinTech* memberikan manfaat untuk masyarakat di dunia dalam melakukan proses pembayaran yang semakin efisien dalam waktu bahkan dapat mengajukan pinjaman dan pengembangan dana dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan metode tradisional sebelumnya. Berbagai masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat pun dapat diselesaikan melalui layanan keuangan berbasis digital melalui *FinTech* seperti kegiatan *crowdfunding*, *mobile payments*, jasa transfer uang, hingga pembiayaan P2P (Goyal et al., 2022). Kecanggihan yang ditawarkan oleh *FinTech* ini menyebabkan banyaknya *startup* yang bermunculan di Indonesia karena dengan adanya *FinTech* sangat membantu keberlangsungan perusahaan mereka untuk bersaing dan mampu bertahan di pangsa pasar industri. Selain itu, dengan kemunculan *FinTech* terdapat beberapa manfaat lain seperti kemudahan dalam transaksi keuangan, mendukung inklusi keuangan, hingga mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik bagi masyarakat di Indonesia.

Untuk mengawali penelitian ini, penulis melakukan pra survey sebagai dasar dalam melakukan riset mendalam terkait penggunaan layanan *FinTech*. Narasumber dari pra-survey ini adalah generasi Y dan Z yang berada di lingkungan terdekat penulis. Hasil pra-survey menunjukkan bahwa generasi Y dan Z merupakan pengguna layanan *FinTech*. *Fintech* dianggap memudahkan kegiatan transaksi yang mereka lakukan. Disamping segudang manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan *FinTech*, terdapat risiko yang ditimbulkan dari penggunaan *FinTech*. Seperti masalah keamanan data dan privasi, Dengan berbagai risiko yang mungkin ditimbulkan dari layanan *FinTech*, membuat

Continuance Intention masyarakat pada penggunaan *FinTech* perlu diteliti apakah memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan *FinTech* atau tidak. *Continuance Intention* merupakan niat pada individu untuk menggunakan aplikasi teknologi secara terus menerus dan berkelanjutan. Berdasarkan pra-survei yang dilakukan, mayoritas narasumber memilih untuk mengesampingkan risiko yang mungkin ditimbulkan dengan tetap menggunakan *FinTech*. Hal ini terjadi karena kehadiran *FinTech* membantu mereka dalam memudahkan kegiatan keuangan yang dilakukan seperti bertransaksi, berinvestasi, mengurus asuransi, dan lain sebagainya. Namun, masih terdapat narasumber dari generasi Y yang ragu untuk menggunakan *FinTech* karena pernah mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah dana pada uang elektronik berbasis *server* sehingga membuatnya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan keuangan dan membuatnya meminimalisir penggunaan *FinTech*.

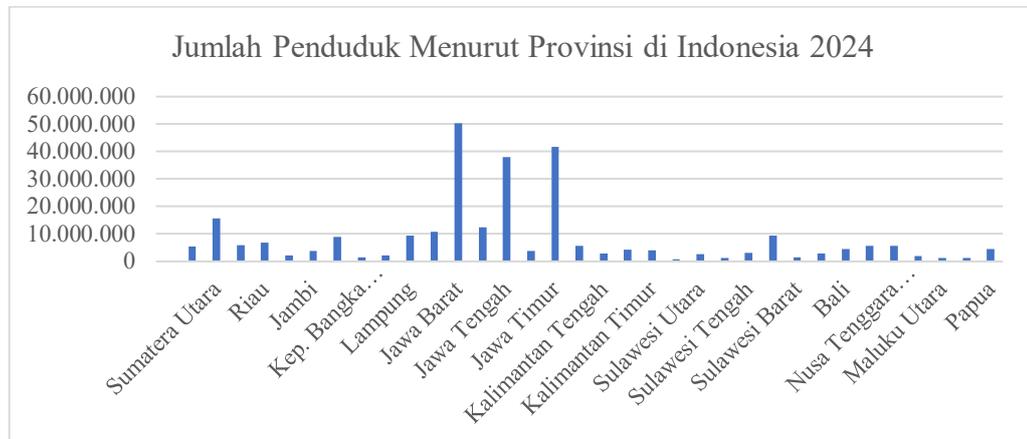
Uang elektronik adalah salah satu produk dari *Financial Technology*. Konsumen menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan transaksi keuangan menggunakan uang elektronik. Uang yang disetorkan oleh konsumen direpresentasikan dengan nilai uang satuan Rupiah melalui media uang elektronik. Saldo pengguna akan otomatis terpotong setelah konsumen melakukan transaksi dengan uang elektronik yang dibaca oleh alat EDC (*Electronic Data Capture*) atau menggunakan *server* aplikasi. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan kegiatan transaksi yang lebih praktis menggunakan metode nontunai dengan menggunakan uang elektronik. Fenomena ini berkembang pesat di Indonesia sejalan dengan aksesibilitas masyarakat Indonesia terhadap teknologi tinggi.

Gerakan yang diciptakan Bank Indonesia, yaitu *Less Cash Society* atau LCS, menjadi kekuatan pendorong di balik keberadaan *e-Money* di Indonesia. Inisiatif ini dimulai sebagai cara Bank Indonesia untuk mengatasi masalah uang yang beredar dalam jumlah yang berlebihan serta biaya yang signifikan terkait dengan pencetakan, penyimpanan, pendistribusian, dan pembuangan uang. Gerakan Non-Tunai Nasional didirikan sebagai upaya ekonomi untuk membantu

gerakan *Less Cash Society*. Kebijakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 memberikan dukungan tambahan untuk hal ini.

Hasil pra-survey terkait uang elektronik menunjukkan bahwa generasi Y dan Z pernah menggunakan uang elektronik. Terdapat alasan bagi mereka untuk menggunakan uang elektronik antara lain; karena mereka sebagai pengguna transportasi umum dalam kesehariannya untuk sampai ke lokasi kantor; sebagai pengendara roda empat yang melintasi jalan tol dan pembayaran hanya dapat dilakukan secara digital sehingga mengharuskan mereka memiliki dan menggunakan uang elektronik; untuk membayar parkir di pusat perbelanjaan seperti *mall* yang sudah mengintegrasikan pembayaran mereka menggunakan pembayaran digital seperti uang elektronik; serta untuk melakukan pembayaran saat berbelanja di supermarket.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, volume transaksi uang elektronik mengalami kenaikan signifikan pada setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2023 bahwa transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai lebih dari Rp300 triliun. Artinya terjadi peningkatan cukup signifikan dalam adopsi teknologi pada pembayaran digital. Penggunaan uang elektronik menjadi opsi yang dipilih oleh sebagian besar kelompok masyarakat Indonesia dalam melakukan sejumlah kegiatan keuangan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat serta perubahan preferensi masyarakat terhadap transaksi non-tunai yang dianggap lebih praktis. Kemudahan yang diberikan oleh uang elektronik kepada pengguna membuat minat masyarakat semakin meningkat. Dengan jumlah transaksi tersebut membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi industri *Financial Technology* yang ingin mengembangkan perusahaannya.



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

Sumber: BPS, 2024

Pada paruh pertama tahun 2024, terdapat 281.603.800 juta orang yang tinggal di Indonesia, menurut data sensus terbaru (Badan Pusat Statistik, 2024). Jawa Barat memiliki populasi terbesar dari tiga puluh delapan (38) provinsi di Indonesia, dengan 50.345.200 penduduk, atau 17,88% dari total populasi negara, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,13% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2024). Jawa Barat memiliki populasi terbanyak karena tingginya angka migrasi masuk sebesar 5.18 juta jiwa menurut laporan Statistik Migrasi Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2020-2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Tingginya angka migrasi ini disebabkan oleh banyaknya pusat industri atau kota pelajar yang terdapat di Jawa Barat, dimana terdapat tiga posisi teratas pada data migrasi keluar pada tahun 2022, yaitu Kota Bandung yang tercatat sejumlah 35.282, Kabupaten Bandung sebesar 31.333, Kota Bogor sejumlah 25.692 (Badan Pusat Statistik, 2024). Terjadinya migrasi membuat Jawa Barat juga mengalami peningkatan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Menurut catatan, Jawa Barat memiliki kepadatan penduduk 1.359 jiwa per kilometer persegi.

Fenomena penggunaan uang elektronik mengalami perkembangan signifikan di Jawa Barat mengingat jumlah penduduk usia produktif yang tinggi serta peningkatan urbanisasi yang mendorong timbulnya sikap positif yang responsif pada masyarakat terhadap teknologi. Selain karena kemudahan yang

diberikan, penggunaan uang elektronik semakin digunakan masyarakat karena adanya dukungan pemerintah dalam membentuk regulasi yang mendukung. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui kebijakan yang mendorong konsep *cashless society* seperti Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Program yang diinisiasi oleh Bank Indonesia ini memberikan dampak positif yaitu membuat kesadaran masyarakat meningkat terhadap penggunaan uang elektronik sehingga masyarakat kini semakin terbiasa dengan menggunakan metode pembayaran digital. Selain itu, uang elektronik membantu menurunkan penggunaan uang tunai (Cahyani & Firmialy, 2022).

Selain karena faktor eksternal dari pemerintah berbentuk dukungan pada kebijakan yang dibuat, Covid-19 yang muncul pada tahun 2020 di Indonesia menjadi salah satu faktor eksternal lain yang menimbulkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan hingga mengubah perilaku masyarakat menuju ke arah digital. Di tengah situasi pandemi Covid-19, masyarakat semakin menyadari pentingnya mengurangi kontak fisik untuk menekan risiko penularan virus, dan pembayaran nontunai menjadi pilihan paling aman dan praktis. (Rabbani, 2022) mengatakan bahwa kebangkitan *Fintech* semakin meningkat di masa Covid-19 sebagai faktor penting bagi ketahanan sistem keuangan serta memberikan solusi inovatif untuk memerangi tantangan ekonomi yang ditimbulkan. Penggunaan uang elektronik meningkat pesat didorong oleh kebutuhan masyarakat dalam meminimalisir interaksi langsung saat melakukan kegiatan transaksi. Selain itu, mitra-mitra juga didorong untuk menyediakan pembayaran nontunai sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kasus Covid-19. Sehingga terjadi dorongan kuat yang saling mendukung antara pihak pemerintah, masyarakat, dan fenomena yang sedang dialami dan mempengaruhi pola kebiasaan masyarakat hingga saat ini. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola perilaku baru bagi masyarakat dalam hal preferensi mereka yang lebih memilih menggunakan pembayaran nontunai. Dengan terus didukung oleh pemerintah melalui infrastruktur digital yang semakin berkembang tiap zaman serta meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan keuangan, penggunaan uang elektronik diperkirakan akan tetap

tumbuh dalam ekosistem pembayaran di Indonesia. Pola perilaku ini berpotensi dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

Setiap negara memiliki tingkat kesejahteraan yang beragam dan diukur dengan berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks. Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi kesejahteraan ini meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, yang menggambarkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat; angka harapan hidup, yang menjadi indikator kesehatan serta akses terhadap layanan kesehatan; dan dukungan sosial, yang menunjukkan kekuatan hubungan sosial dan jaringan bantuan di sekitar individu. Selain tiga faktor tersebut, kebebasan menentukan pilihan hidup merupakan aspek penting yang menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Persepsi terhadap korupsi juga turut memengaruhi kesejahteraan, karena korupsi yang rendah menggambarkan bahwa rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Disamping itu, terdapat aspek kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif, seperti rasa syukur, optimisme, dan nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat. Faktor-faktor ini secara keseluruhan dapat membentuk gambaran tingkat kesejahteraan sebuah negara yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang beragam di setiap tempat.

Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat berkembang signifikan tiap zaman. *United National Development Program* (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 1992, digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. IPM menggunakan tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita sebagai indikator. Namun, pendekatan ini terus berkembang. Pada November 2007, diadakan Konferensi Beyond GDP yang menyebabkan pengukuran tingkat kesejahteraan berkembang menjadikan indikator non ekonomi dan psikologi menjadi aspek yang perlu diteliti, tidak hanya indikator ekonomi saja. Hal ini menandai perubahan besar dalam konsep kesejahteraan global. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2011, memperkenalkan *Happiness Index* atau Indeks Kebahagiaan sebagai pengukur tingkat kesejahteraan melalui persepsi individu terhadap berbagai aspek kehidupan. Kebahagiaan

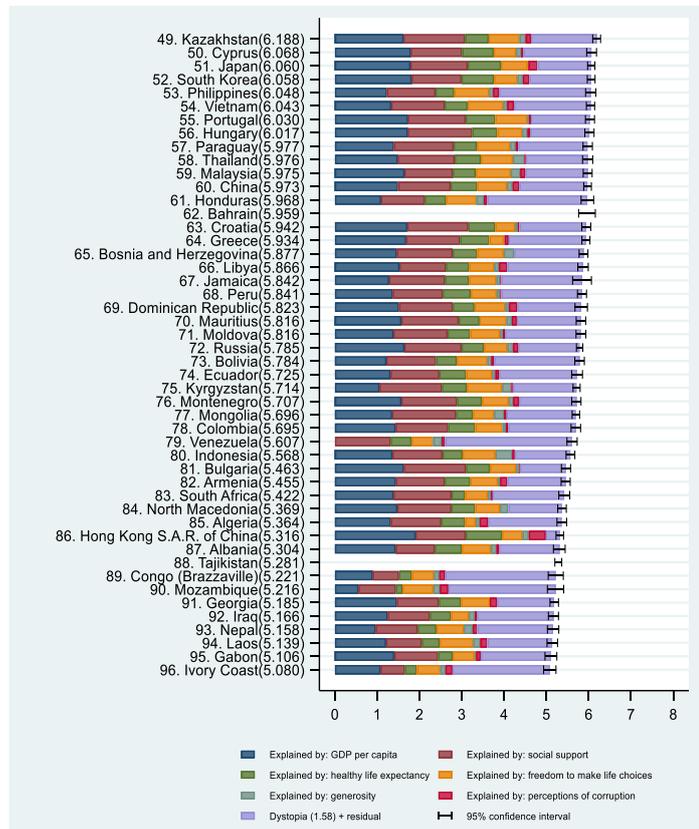
merupakan aspek penting dari kesejahteraan psikologis, dan kebahagiaan penting untuk diukur karena bermanfaat bagi pembuat kebijakan (Kenzo et al., 2024). Indeks kebahagiaan dianggap penting bagi suatu negara karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan masyarakat dan dapat mencerminkan kualitas hidup yang sebenarnya pada suatu negara.

Untuk pertama kalinya, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mulai menghitung Indeks Kebahagiaan pada tahun 2012 melalui kegiatan penelitian mengenai instrumen yang mampu mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat. Kemudian pada tahun 2014, BPS melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan, yang semula mengaplikasikan satu dimensi, yaitu Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), sebagai indikator utamanya. Inovasi ini terus berkembang, dan pada tahun 2017, BPS memperluas cakupan survei tersebut dengan menambahkan dua dimensi baru, yaitu Dimensi Perasaan (*Affect*), yang menilai emosi positif dan negatif pada individu, dan Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*), yang mengukur perasaan memiliki tujuan hidup. Melalui penyempurnaan dimensi ini, survei kebahagiaan yang dilakukan oleh BPS mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan subjektif pada masyarakat di Indonesia.

Bhutan, negara Kerajaan kecil di Himalaya Asia Selatan, menjadi negara yang menerapkan *Gross National Happiness* (GNH dan *Happiness Index* sebagai alat ukur kebahagiaan dengan memperhitungkan aspek-aspek seperti spiritual, emosional, hubungan sosial, kesehatan, lingkungan, pencapaian pribadi, ketulusan hati, serta faktor yang membuat seseorang Bahagia (Wirawan, 2024).

Berdasarkan *World Happiness Report* tahun 2024, Indonesia memasuki urutan ke-80 dari total 143 negara dan peringkat ke-6 se Asia Tenggara dengan skor kebahagiaan sebesar 5.568 (*Gambar 1.2*). Laporan ini mengevaluasi rata-rata tingkat kepuasan hidup individu (*individuals average life evaluations*) sebagai dasar perhitungan pada Indeks Kebahagiaan. Para peneliti mengambil data perhitungan tersebut dari tahun 2021 sampai 2023. *World Happiness Report* dirilis setiap tanggal 20 Maret yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebahagiaan Internasional. Dengan menggabungkan data kuantitatif dan aspek-aspek kualitas hidup, *World Happiness Report* memberikan wawasan mengenai faktor-faktor

yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan kondisi sosial-ekonomi dan budaya yang mampu memengaruhi tingkat kebahagiaan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Helliwell et al., 2024).



Gambar 1. 2 Peringkat Indeks Kebahagiaan Menurut World Happiness Report 2024

Sumber: World Happiness Report 2024

Indeks Kebahagiaan Indonesia dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2017–2021. Berbeda dengan tahun 2014, teknik perhitungan Indeks Kebahagiaan yang digunakan pada tahun 2017–2021 memperhitungkan tiga dimensi: Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), Perasaan (*Affect*), dan Makna Hidup (*Eudaimonia*) yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang kesejahteraan emosional dan makna hidup masyarakat. Sedangkan pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2014 menggunakan dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*) saja yang memungkinkan gambaran mendalam tentang kualitas kebahagiaan. Hasilnya menunjukkan variasi indeks yang cukup mencolok di

seluruh Indonesia. Pada *Tabel 1.2* terdapat data Indeks Kebahagiaan menurut provinsi pada tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan laporan tersebut, Maluku Utara menempati peringkat pertama dengan skor 76,34, diikuti oleh Kalimantan Utara (76,33) dan Maluku (76,28). Provinsi lain yang masuk dalam 10 besar adalah Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara dengan skor berkisar antara 74,46 hingga 75,17. Sementara itu, provinsi dengan Indeks Kebahagiaan terendah adalah Bengkulu (69,74), Papua (69,87), dan Nusa Tenggara Barat (69,98). Beberapa provinsi lainnya yang berada di peringkat bawah antara lain Jawa Barat (70,23), Nusa Tenggara Timur (70,31), dan Sumatera Utara (70,57). Secara umum, provinsi di bagian timur Indonesia dan beberapa wilayah di Kalimantan cenderung memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepuasan hidup, kesejahteraan ekonomi, serta kondisi sosial dan budaya di masing-masing daerah.

Tabel 1. 2 Indeks Kebahagiaan Berdasarkan Provinsi Tahun 2021

Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2021					
1.	Maluku Utara	76,34	20.	Riau	71,80
2.	Kalimantan Utara	76,33	21.	Jawa Tengah	71,73
3.	Maluku	76,28	22.	DI Yogyakarta	71,70
4.	Jambi	75,17	23.	Lampung	71,64
5.	Sulawesi Utara	74,96	24.	Bali	71,44
6.	Kep. Riau	74,78	25.	Sumatera Barat	71,34
7.	Gorontalo	74,77	26.	Aceh	71,24
8.	Papua Barat	74,52	27.	DKI Jakarta	70,68
9.	Sulawesi Tengah	74,46	28.	Sumatera Utara	70,57
10.	Sulawesi Tenggara	73,98	29.	Nusa Tenggara Timur	70,31
11.	Kalimantan Timur	73,49	30.	Jawa Barat	70,23
12.	Kalimantan Selatan	73,48	31.	Nusa Tenggara Barat	69,98

13.	Sulawesi Barat	73,46	32.	Papua	69,87
14.	Kep. Bangka Belitung	73,25	33.	Bengkulu	69,74
15.	Kalimantan Tengah	73,13	34.	Banten	68,08
16.	Sulawesi Selatan	73,07	35.	Papua Barat Daya	-
17.	Kalimantan Barat	72,49	36.	Papua Selatan	-
18.	Sumatera Selatan	72,37	37.	Papua Tengah	-
19.	Jawa Timur	72,08	38.	Papua Pegunungan	-

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Jawa Barat yang memiliki penduduk tertinggi di Provinsi Indonesia, justru menduduki peringkat ke-30 dengan nilai Indeks Kebahagiaan sebesar 70,23. Posisi Jawa Barat dengan populasi masyarakat tertinggi di Indonesia namun tidak masuk dalam sepuluh besar peringkat Indeks Kebahagiaan di Indonesia kerap menjadi pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah total penduduk yang besar dengan akses kemudahan yang baik terhadap fasilitas umum seperti aspek pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Namun hal ini tetap saja tidak menjadikan Jawa Barat memiliki angka Indeks Kebahagiaan yang tinggi. Sehingga muncul berbagai spekulasi terhadap faktor penyebab yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat di Jawa Barat. Kemungkinan-kemungkinan tersebut antara lain tingginya angka kepadatan penduduk yang memungkinkan dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial, biaya hidup yang tinggi, tingkat pengangguran yang cukup tinggi akibat kesenjangan ekonomi, kemacetan lalu lintas, tekanan sosial dan kompetisi yang tinggi, serta permasalahan urbanisasi yang mampu menurunkan tingkat kenyamanan hidup masyarakat.

Di dunia, terdapat beberapa generasi yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia serta ciri khas unik yang terbentuk dari pengaruh sosial, budaya, dan teknologi pada masa mereka. Setiap generasi mempunyai kepribadian dan pola pikir yang berbeda-beda berdasarkan peristiwa historis, pengaruh teknologi, maupun dinamika sosial yang dialami oleh masing-masing dari mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan penduduk Indonesia menjadi enam generasi, yaitu Pre-Boomer, Baby Boomer, Generasi X (Gen X), Milenial (Gen Y),

Generasi Z (Gen Z), dan Post Generasi Z (Post Gen Z) atau Gen Alpha. Generasi Pre-Boomer adalah penduduk dengan kelahiran sebelum tahun 1946, mereka adalah kelompok yang melalui masa-masa sulit seperti Perang Dunia II. Generasi Baby Boomer adalah penduduk dengan kelahiran antara tahun 1946 hingga 1964, mereka adalah kelompok yang mulai mengalami perkembangan setelah masa perang. Generasi X adalah penduduk dengan kelahiran antara tahun 1965 hingga 1980, mereka adalah kelompok yang tumbuh saat teknologi mulai muncul di kehidupan mereka. Generasi Y atau Milenial adalah penduduk dengan kelahiran antara tahun 1981 hingga 1996, mereka adalah kelompok yang besar saat era globalisasi dan internet yang sudah berkembang sehingga terbuka dengan digitalisasi serta keragaman budaya yang menyebabkan perubahan sosial. Generasi Z adalah penduduk dengan kelahiran antara tahun 1997 hingga 2012, mereka adalah kelompok yang sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi dan digitalisasi. Post Generasi Z atau Gen Alpha adalah penduduk dengan kelahiran setelah tahun 2012, mereka adalah kelompok termuda yang akan menghadapi teknologi yang semakin canggih.

Berdasarkan perhitungan sensus terakhir oleh BPS pada 2020, jumlah total penduduk di Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa. Dari keseluruhan generasi yang ada, Gen Z mendominasi jumlah penduduk di Indonesia dengan jumlah 71.509.082 jiwa, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi muda secara signifikan. Lalu di posisi kedua, terdapat Gen Y atau Milenial dengan jumlah 69.699.972 jiwa, disusul oleh Gen X yang mencapai 56.557.299 jiwa. Sementara itu, Post Gen Z berjumlah 35.320.089 jiwa, Baby Boomer sebanyak 32.492.975 jiwa, dan Pre-Boomer sebanyak 4.624.500 jiwa (*Gambar 1.3*).



Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Klasifikasi Generasi

Sumber: BPS, 2020

Populasi tertinggi pada seluruh kategori generasi yang ada diraih oleh Provinsi Jawa Barat (*Tabel 1.3*). Pada kelompok Pre-Boomer, tercatat Jawa Barat dengan penduduk sejumlah 672.632 jiwa, meraih posisi tertinggi diantara provinsi lainnya, sementara angka terendah dimiliki oleh Papua Barat dengan 7.441 jiwa. Di kelompok Baby Boomer, angka tertinggi kembali diraih oleh Jawa Barat dengan 5.600.895 jiwa, sementara posisi terendah oleh Papua Barat dengan 90.113 jiwa. Generasi X di Jawa Barat mencapai 10.169.066 jiwa yang lebih besar dibandingkan dengan Papua Barat dengan jumlah 210.930 jiwa. Pada kelompok Generasi Y, Jawa Barat kembali mendominasi dengan 12.653.335 jiwa, sementara provinsi dengan jumlah terendah oleh Kalimantan Utara dengan 194.197 jiwa. Generasi Z di Jawa Barat mencapai total 12.965.539 jiwa dan posisi terendah oleh Kalimantan Utara sebesar 205.124 jiwa. Begitu juga pada Post Gen Z dimana Jawa Barat meraih posisi pertama dengan 6.212.835 jiwa, sementara itu Kalimantan Utara di posisi terendah sebesar 92.259 jiwa.

Tabel 1. 3 Sensus Penduduk Berdasarkan Kategori Kelompok Generasi Tahun 2020

Kelompok Generasi	Tingkat	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)

Post Generasi Z	Tertinggi	Jawa Barat	6.212.835
	Terendah	Kalimantan Utara	92.259
Generasi Z	Tertinggi	Jawa Barat	12.965.399
	Terendah	Kalimantan Utara	205.124
Generasi Y (Milenial)	Tertinggi	Jawa Barat	12.653.335
	Terendah	Kalimantan Utara	194.197
Generasi X	Tertinggi	Jawa Barat	10.169.066
	Terendah	Papua Barat	210.930
Baby Boomer	Tertinggi	Jawa Barat	5.600.895
	Terendah	Papua Barat	90.113
Pre Boomer	Tertinggi	Jawa Barat	672.632
	Terendah	Papua Barat	7.441

Sumber : Data Olahan Penulis (2024)

Dominasi populasi pada Provinsi Jawa Barat di setiap kategori generasi kelompok mencerminkan bahwa penduduk di provinsi tersebut adalah yang terbanyak di Indonesia. Sehingga Jawa Barat memberikan kontribusinya secara substansial terhadap komposisi demografis nasional dalam setiap generasi, mulai dari Pre-Boomer hingga Post Generasi Z. Kepadatan penduduk yang tinggi di Jawa Barat menggambarkan daya tarik yang dimiliki oleh provinsi ini cukup tinggi. Hal ini dapat didukung karena Jawa Barat dikenal sebagai pusat ekonomi dan industri dengan kemudahan akses infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki.

Pemilihan Generasi Y (Millennial) dan Generasi Z sebagai fokus dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai temuan yang menunjukkan bahwa kedua kelompok ini tengah menghadapi tantangan signifikan dalam hal kesejahteraan dan kebahagiaan. Studi McKinsey (2022) menyatakan bahwa Gen Z memiliki tingkat kesejahteraan emosional dan sosial paling rendah dibandingkan generasi lainnya, dengan hanya 15% yang menilai kesehatan mental mereka dalam kondisi sangat baik dan sekitar 25% mengalami tekanan emosional berat (McKinsey & Company, 2022). Hal ini menunjukkan adanya krisis kebahagiaan yang nyata dalam kelompok usia ini. Generasi Y, yang kini berada di usia produktif, juga tidak lepas dari

tekanan. Mereka menghadapi beban finansial seperti utang pendidikan dan ketidakpastian pekerjaan yang berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka (Psychiatrist.com, 2022). Lebih jauh, Generasi Y dan Z adalah generasi yang sangat terpapar oleh teknologi dan media sosial. Meski mereka mendapatkan kemudahan informasi dan konektivitas, penggunaan teknologi ini juga dihubungkan dengan meningkatnya perasaan cemas, kesepian, serta tekanan sosial (Coe et al., 2023). Di sisi lain, krisis makna dalam hidup juga menjadi sorotan. Survei Gallup yang dilakukan oleh Walton Family Foundation (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar Gen Z tidak merasa termotivasi dalam pendidikan maupun pekerjaan, meskipun rasa memiliki tujuan terbukti sangat memengaruhi tingkat kebahagiaan mereka (Walton Family Foundation, 2024). Fenomena-fenomena ini mengindikasikan bahwa Generasi Y dan Z sedang mengalami krisis kebahagiaan dalam berbagai bentuk, baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah ada intervensi atau faktor eksternal yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam konteks tersebut, keberadaan Indeks Kebahagiaan menjadi sangat penting karena mampu menangkap gambaran kesejahteraan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari pengalaman dan kondisi psikologis individu. Indeks ini berguna sebagai alat untuk membantu peneliti maupun pembuat kebijakan memahami bagaimana kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda, dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan relevan dengan realitas mereka. Mengacu pada hal tersebut, layanan *FinTech* seperti uang elektronik bisa menjadi salah satu faktor yang relevan. Penggunaan uang elektronik berpotensi memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan kenyamanan dalam aktivitas digital sehari-hari, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi indeks kebahagiaan mereka. Maka dari itu, penelitian mengenai hubungan antara *Continuance Intention* dalam penggunaan uang elektronik dan Indeks Kebahagiaan pada Generasi Y dan Z di Jawa Barat menjadi penting untuk dilakukan.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang, terdapat rumusan masalah yang dapat diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh penggunaan uang elektronik yang berkelanjutan terhadap Indeks Kebahagiaan pada Generasi Y di Jawa Barat?
- b. Bagaimana pengaruh penggunaan uang elektronik yang berkelanjutan terhadap Indeks Kebahagiaan pada Generasi Z di Jawa Barat?
- c. Bagaimana pengaruh penggunaan uang elektronik yang berkelanjutan terhadap Indeks Kebahagiaan terhadap Generasi Y dan Generasi Z di Jawa Barat secara keseluruhan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan uang elektronik yang berkelanjutan terhadap Indeks Kebahagiaan pada Generasi Y di Jawa Barat.
- b. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan uang elektronik yang berkelanjutan terhadap Indeks Kebahagiaan pada Generasi Z di Jawa Barat.
- c. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan uang elektronik yang berkelanjutan terhadap Indeks Kebahagiaan pada Generasi Y dan Generasi Z di Jawa Barat secara keseluruhan.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis:
 - Memberikan partisipasi terhadap perluasan ilmu pengetahuan di bidang *FinTech* dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.
 - Menambah wawasan ilmiah tentang kaitan antara *FinTech* yang berkelanjutan dan Indeks Kebahagiaan.
 - Menambah literatur tentang perilaku pengguna uang elektronik di Indonesia.
- b. Kegunaan Praktis:

- Bagi penyedia layanan uang elektronik: membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi indeks kebahagiaan pengguna.
- Bagi pemerintah: acuan untuk merumuskan kebijakan yang mendorong siklus keuangan digital yang positif.
- Bagi masyarakat umum: meningkatkan pemahaman tentang uang elektronik, khususnya pada Generasi Y dan Z.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan yang luas, ringkas, dan dapat dimengerti yang dengan tepat menangkap esensi penelitian. Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir semuanya tercakup dalam bab ini.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori yang disusun dari aspek umum hingga khusus, dilengkapi dengan tinjauan penelitian sebelumnya, serta diikuti oleh kerangka pemikiran dan hipotesis apabila diperlukan.

c. BAB III METODELOGI PENELITIAN

Strategi, taktik, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data untuk menjawab pertanyaan penelitian dibahas dalam bab ini. Jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel (untuk penelitian kuantitatif), pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data semuanya diuraikan dalam bab ini.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian dan pembahasan disajikan dalam subjudul yang berbeda dan disusun secara metodis sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Temuan penelitian disajikan di bagian pertama bab ini, diikuti dengan diskusi atau analisis temuan di bagian kedua. Analisis data adalah langkah pertama dalam setiap topik debat, diikuti dengan interpretasi dan

penarikan kesimpulan. Lebih baik membandingkan topik dengan studi sebelumnya atau teori terkait.

e. BAB V KESIMPULAN

Masalah penelitian dibahas dalam kesimpulan, yang berfungsi sebagai dasar rekomendasi mengenai keuntungan penelitian.